

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran sistem pemerintah Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintah yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berlandaskan pada UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya undang-undang ini diganti dan disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua Undang-Undang tersebut telah berubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horisontal yaitu kepada masyarakat melalui DPRD.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Abdullah (2005) dalam melaksanakan pemerintah, pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat. Kedua, pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting dilingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antara pemerintah dan DPRD untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002). Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Oleh karena itu anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas.

Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari agent atau pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003 dalam Suhartono, 2006) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001: Kluvers, 2001” Jones dan Pendlebury, 1996 dalam Suhartono, 2006). Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran, ratifikasi anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan evaluasi anggaran.

Penelitian Darma (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah. Namun sebaiknya, penelitian Adoe (2002) dalam Suhartono (2006) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian Djumirin (2001) dalam Suhartono (2006) menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah, menjadi relevan dan penting.

Hasil temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, menunjukkan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara penjelasan sasaran anggaran dengan dampaknya. Fahrianta dan Ghozali (2002) dan Riyanto (2003) dalam Suhartono (2002) mengatakan kemungkinan belum adanya faktor-faktor tertentu (situational factors) atau yang lebih dikenal dengan istilah variabel kontijensi (contingency variables). Hal ini mendukung Riyanto (2003) dalam Suhartono (2006) yang menyatakan perlunya penelitian mengenai pendekatan kontijensi.

Pengendalian manajemen merupakan satu dari tipe aktivitas perencanaan dan pengendalian yang terjadi dalam suatu organisasi. Beberapa aktivitas yang termasuk dalam pengendalian manajemen adalah perencanaan aktivitas yang dilakukan, pengkoordinasian aktivitas, pengkomunikasian informasi, pembuatan keputusan yang menyangkut apakah aktivitas akan dilakukan dan bagaimana mempengaruhi orang-orang dalam organisasi untuk merubah perilakunya. Sedangkan pengendalian akuntansi adalah sebagai pengendalian yang berdasarkan pada angka-angka akuntansi seperti anggaran, standard costing, dan flexible budgeting. Oleh karena itu sistem pengendalian akuntansi (Miah dan Mia, 1996 dalam Darma 2004) berguna untuk meningkatkan pencapaian kinerja. Miah dan Mia (1996) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa pilihan struktur organisasi memiliki implikasi yang signifikan dengan sistem informasi akuntansi.

Komitmen organisasi memiliki beberapa pengertian tergantung pada latar belakangnya. Komitmen organisasional yang kuat didalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan

tujuan dan kepentingan organisasi serta akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat baik demi kepentingan organisasi (Porte *et al*, 1979 dalam Darlis 2000).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam lingkup penelitiannya dan cara pengujiannya. Untuk metode penelitian menggunakan uji chow test, sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan regresi berganda. Sampel penelitian ini yaitu SKPD berupa badan, kantor, dinas, kecamatan yang ada di kabupaten dan kota di DIY.

Dengan mengacu pada latar belakang diatas dan adanya ketidakkonsistenan antara peneliti yang satu dengan penelitian yang lainnya maka penulis tertarik menguji ulang penelitian Abdullah (2005) yang berjudul ***“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”*** dan sampel dari Kota dan Kabupaten di DIY.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran antara Kota Yogyakarta dengan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran antara Kabupaten Bantul dengan, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran antara Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
4. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
5. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengendalian akuntansi antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengendalian akuntansi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
8. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengendalian akuntansi antara Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
9. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengendalian akuntansi antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
10. Apakah terdapat perbedaan pengaruh pengendalian akuntansi antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
11. Apakah terdapat perbedaan pengaruh komitmen organisasi antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
12. Apakah terdapat perbedaan pengaruh komitmen organisasi antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
13. Apakah terdapat perbedaan pengaruh komitmen organisasi antara Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

14. Apakah terdapat perbedaan pengaruh komitmen organisasi antara Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
15. Apakah terdapat perbedaan pengaruh komitmen organisasi antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
16. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
17. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi Kabupaten Bantul terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
18. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi Kabupaten Gunung Kidul terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
19. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi Kabupaten Kulon Progo terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
20. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi Kabupaten Sleman terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Memberi bukti empiris mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberi bukti empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Memberi bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Memberi bukti empiris mengenai ada tidaknya perbedaan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan komitmen organisasi antara Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

D. Manfaat Penelitian

1. Di bidang teoritis dapat memberikan petunjuk dalam penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Di bidang praktik penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah propinsi DIY. Selain itu diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan untuk desain sistem pengendalian manajemen kepada penentu kebijakan di lingkungan pemerintah pusat khususnya termasuk dalam hal kontribusi pembinaan lingkup organisasi pemerintah dan sumber daya manusia.